



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KERJASAMA TRANSFER TEKNOLOGI PERTAHANAN RI-HONGARIA

Aryojati Ardipandanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandant@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Hongaria untuk Indonesia, H.E. Ms. Lilla Karsay, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Menhan RI, Prabowo Subianto menjelaskan, bahwa dalam pertemuan bilateral ini Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama pertahanan yang lebih kuat dengan Hongaria terutama dalam hal transfer teknologi. Selain itu, Indonesia juga sedang berupaya mengembangkan industri pertahanan nasional sejalan dengan pemenuhan kebutuhan alutsista.

Hongaria merupakan negara yang memiliki keunggulan bidang riset dan teknologi sebanding dengan negara-negara Eropa lainnya. Selama ini Indonesia juga telah menjalin kerja sama erat dengan Hongaria dalam berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, perdagangan, energi dan lain sebagainya. Dalam bidang pertahanan, Republik Indonesia saat ini tengah fokus pada pembangunan kapasitas (*capacity building*) dan industri strategis. Indonesia juga terus berupaya untuk berperan aktif dalam misi perdamaian di bawah bendera PBB di berbagai belahan dunia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di akhir pertemuan, kedua negara berharap hubungan pertahanan ke depan semakin diperkuat.

Pertemuan Menhan RI, Prabowo Subianto, dengan Dubes Hongaria turut dihadiri juga oleh pejabat Kementerian Pertahanan (Kemhan), yaitu Plt. Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan, Mayor Jenderal TNI Rui Duarte. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan kerja sama Republik Indonesia dengan Hongaria dalam ranah pertahanan. Sebelumnya, pada 19 Mei 2021 Menhan RI, Prabowo Subianto, juga pernah menerima kunjungan kehormatan Dubes Hongaria untuk Indonesia, H.E. Judit Pach, di Kemhan. Dalam pertemuan tersebut Dubes Hongaria dan Menhan RI membicarakan mengenai upaya peningkatan hubungan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan bagi kedua negara khususnya di bidang pertahanan.

Secara resmi hubungan Indonesia-Hongaria dimulai sejak 26 Juni 1955 yang berlanjut pada kesepakatan untuk saling mendukung pencalonan Indonesia dan Hongaria di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak 2016, Hongaria telah berinvestasi di Indonesia dan pada 2020 investasi Hongaria mencapai USD 1,5 miliar dengan mayoritas investasi pada perdagangan, hotel, dan restoran di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Menteri Pertahanan Hongaria, Kristóf Szalay-Bobrovniczky mengatakan bahwa pada tahun 2024 Hongaria akan bergantung pada angkatan udaranya. Berbicara dalam konferensi internasional yang berfokus pada keamanan dan pertahanan Eropa di Fehervarcsurgo, Selatan Budapest, Szalay-Bobrovniczky mengatakan bahwa dengan perluasan armada Angkatan Darat yang terdiri dari 14 jet tempur Gripen dan empat jet tempur lainnya, Hongaria akan menjadi "ahli" dalam bidang tersebut, mengingat kemampuan mereka dalam pelatihan dan pemeliharaan terkait.

Selain itu, Hongaria akan menerima pengiriman dua pesawat angkut yang dipasok oleh Brasil, serta pesawat pelatihan dan pengintaian yang diproduksi di Chekoslovakia. Pembelian *drone* pengintaian juga ada dalam agenda. Selain pembelian yang memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata, Hongaria juga mempertimbangkan untuk mengadakan pengembangan industri pertahanannya, dengan maksud untuk mempersiapkannya bagi pasar ekspor. Hongaria juga melakukan pengembangan proyek pembuatan infantri lapis baja Lynx, penyiapan kendaraan tempur di Zalaegerszeg dan pembangunan pabrik amunisi di Varpalota. Terdapat pula “perubahan budaya” dalam angkatan bersenjata Hongaria, yang intinya adalah memiliki unit profesional yang mampu mengoperasikan peralatan mutakhir di pangkalan-pangkalan di seluruh negeri. Dua bidang fokus utama Hongaria di Uni Eropa pada paruh kedua tahun 2024 adalah memperkuat kemampuan pertahanan blok dan meningkatkan kapasitas industri pertahanannya.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI perlu mengingatkan bahwa *pertama*, tindak lanjut kerja sama transfer teknologi pertahanan dengan Hongaria harus dilakukan dalam forum Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kementerian Pertahanan diharapkan tidak bergerak sendiri, karena dalam masalah transfer teknologi pertahanan, perlu ada sinkronisasi antara kebutuhan Pengguna alutsista dengan industri pertahanan yang ada. Pasal 21 ayat (1) huruf (f) UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menyebutkan bahwa KKIP melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan. Jika amanat UU ini diabaikan, maka belum tentu transfer teknologi yang dilakukan memang sesuai dengan kebutuhan pengguna alutsista. *Kedua*, Komisi I DPR RI harus menekankan bahwa selain transfer teknologi pertahanan, Menteri Pertahanan RI perlu meminta kepada Hongaria untuk memberikan program peningkatan kapasitas penguasaan teknis teknologi oleh tenaga-tenaga teknis Indonesia, karena akan sia-sia jika peningkatan teknologi tidak disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam menangani teknologi tersebut.

Sumber

dailynewshungary.com, 23 Maret 2024;

infopublik.id, 20 Mei 2021;

kemhan.go.id, 22 Maret 2024;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024